

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan masyarakat di sekitar hutan seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya setempat. Masalah ini meliputi pola kehidupan, mata pencaharian, dan upaya untuk melestarikan hutan sebagai sumber pendapatan. Tingkat pendapatan yang rendah dan pola tani yang cenderung subsisten menjadi faktor utama penyebab kemiskinan bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian sebagai basis ekonomi utama (Dailami et al., 2024).

Keberadaan masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan tentu saja mendorong terjadi interaksi antar keduanya. Mengingat hutan merupakan sumber daya yang memiliki potensi besar bagi pendapatan masyarakat. Jika masyarakat tidak diberikan akses yang sah maka resiko perambahan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi sangat tinggi (Wasongko et al., 2024).

Total luas hutan Indonesia mencapai 120,7 juta hektar yang setara dengan 63,42% dari total luas daratan. Hal ini tentu saja dapat menjadi suatu langkah bagi Negara untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Namun kenyataannya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan hidup dalam lingkaran kemiskinan (Faizal & Sunan, 2023). Pada tahun 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 36,7% dari 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan termasuk kategori miskin. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mendapatkan akses dan kesempatan dalam tindakan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh negara, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai sumber penghidupan yang layak.

Salah satu solusi yang dihadirkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah program Perhutanan Sosial (Faizal & Sunan, 2023). Tujuan program ini tentunya untuk pemerataan sektor ekonomi dalam masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Program ini memberikan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sumber daya alam (Wasongko et al., 2024).

Salah satu skema perhutanan sosial yang diterapkan adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dibentuklah sebuah kelompok tani hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan memperkuat peran mereka dalam menjaga kelestarian hutan. Melalui surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.3180/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2022, Pemerintah memberikan izin kelola Hutan Kemasyarakatan kepada kelompok tani hutan Allaringe seluas 274 hektare pada kawasan hutan lindung Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Melalui pengelolaan hutan secara berkelanjutan, anggota kelompok tani dapat memanfaatkan hasil hutan, seperti

buah-buahan dan produk hutan lainnya sebagai sumber penghidupan yang mendukung peningkatan kesejahteraan mereka.

Kesejahteraan merujuk pada keadaan yang mencerminkan kualitas hidup yang baik, di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kesejahteraan sosial seringkali dipahami sebagai kondisi kesejahteraan, mencakup pemenuhan kebutuhan material dan non-material. Kesejahteraan sosial menggambarkan situasi di mana individu merasa aman dan bahagia karena kebutuhan dasar mereka telah terpenuhi. Selain itu, kesejahteraan sosial juga mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko utama yang dapat mengancam kehidupan (Lestari et al., 2024). Dalam konteks ini, kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui peningkatan kualitas hidup mereka setelah memperoleh izin pengelolaan hutan.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian “Dampak Pemberian Izin Pengelolaan Hutan Terhadap Kesejahteraan Kelompok Tani Hutan Allaringge Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng” dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait pengelolaan hutan termasuk perubahan dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat serta menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan hutan di Desa Watu.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dampak dari pemberian akses pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, kualitas lingkungan, kesehatan, ketahanan pangan, kepuasan hidup, dan aspek sosial melalui izin Perhutanan Sosial di areal HKm Kth Allaringge
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat program HKm Kth Allaringge Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

1.3 Landasan Teori

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan skema perhutanan sosial yang berada di hutan negara dengan memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat dalam peningkatan perekonomian dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83/MENLHK/2016 tentang Perhutanan Sosial). Kegiatan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dilakukan oleh masyarakat setempat yang dijadikan mitra pemerintah dengan menggunakan areal kerja HKm sebagai kawasan yang dikelola dengan skema

hak guna pakai dan bukan hak milik. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang terjadi di masyarakat dan diharapkan dapat melestarikan hutan serta meningkatkan ekonomi masyarakat (Fauzi & Nahlunnisa, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian Martapani et al. (2021), Keberadaan perhutanan sosial membawa dampak bagi kelompok tani HKm MPG Sukamaju. Dampak sosial yang terjadi pada kelompok tani HKm MPG Sukamaju berupa peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Perhutanan Sosial yang memberikan kesempatan masyarakat untuk mengelola hutan. Juga berdampak terhadap penyelesaian konflik lahan, perubahan perilaku masyarakat dalam membuka lahan tanpa bakar, dan penguatan kembali budaya gotong-royong yang mulai memudar. Dampak ekonomi yang terjadi pada kelompok tani MPG Sukamaju berupa adanya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, pengembangan peluang usaha, dan kemitraan bisnis.

Sejahtera adalah kondisi dimana dalam keadaan makmur, sehat dan damai (Argo et al., 2021). Menurut Bentham (1748-1832) teori dasar Kesejahteraan yaitu *Welfare State*. Teori tersebut menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan (Elviandri et al., 2019). Dengan demikian Perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan. Dalam konteks ini, perhutanan sosial dapat berperan sebagai strategi yang efektif, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki kondisi sumber daya alam tempat masyarakat tersebut menggantungkan hidupnya. Program perhutanan sosial dapat dijadikan solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka (Toha et al., 2023)

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024-Januari 2025 di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Alat tulis menulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat hasil wawancara dengan responden
2. Perekam suara, digunakan untuk merekam suara dari narasumber pada saat wawancara
3. Kamera, digunakan untuk dokumentasi keadaan lapangan
4. Panduan Wawancara, digunakan sebagai pedoman pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data wawancara

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Desa Watu yang termasuk dalam anggota KTH Allaringnge. Sampel yang merupakan responden pada penelitian ini ditentukan dengan Teknik *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan sampel anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dalam anggota populasi tersebut. Menurut Surakhmad (2005), apabila ukuran populasi kurang dari 100, maka pengambilan sampel sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi. Apabila ukuran populasi sama dengan atau lebih dari 1000, maka diambil sekurang-kurangnya 15% dari total populasi. Jumlah populasi adalah 69. Dengan menggunakan rumus tersebut maka jumlah sampel yang dipilih sebesar 51,4% yakni 35 orang.

2.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan data hasil observasi lapangan. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari lembaga/instansi yang terkait dengan penelitian antara lain SK Pemberian IUPHKm KTH Allaringnge dan dokumen Penataan Areal Kerja KTH Allaringnge, data dari jurnal, buku, dan artikel yang mendukung penelitian ini.

2.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, wawancara adalah salah satu metode penelitian sosial yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait
2. Observasi, observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati terkait dengan pelaksanaan kegiatan KTH Allaringnge, aktivitas yang dilakukan, serta kondisi anggota kelompok tani hutan.

3. Studi dokumen, studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi melalui dokumen-dokumen pengelolaan hutan, serta jurnal, skripsi, buku, dan sebagainya

2.6 Metode Analisis Data

Data yang telah diolah serta diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian dan selanjutnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif. Data akan dianalisis sesuai indikator tingkat kesejahteraan (*well-being*) antara lain:

1. Pendapatan dan Aset Rumah Tangga
2. Kesehatan dan kualitas lingkungan
3. Ketahanan Pangan
4. Kebebasan Akses
5. Keadilan
6. Relasi Sosial dan Keamanan
7. Kepuasan Hidup
8. Pemanfaatan Lahan

Data yang terkumpul dari metode wawancara dan observasi kemudian diolah serta diklasifikasikan sesuai tujuan penelitian dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada kalimat atau uraian yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis data yaitu:

- a. Reduksi data, informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan pengamatan lapangan direkapitulasi kemudian dikelompokkan. Proses reduksi data ini dilakukan bertahap selama penelitian dan setelah dilakukan pengumpulan data hingga laporan tersusun.
- b. Penyajian data, dilakukan dengan memperluas informasi yang didapatkan dari responden menjadi suatu teks naratif untuk menggambarkan informasi dari responden terkait indikator-indikator kesejahteraan
- c. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data.